



SEMINAR

Isu-isu Strategis Pengarusutamaan Disabilitas pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Dr. Arni Surwanti., M.Si

Yogyakarta, 27 Nopember 2018

Kondisi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas Menghadapi Persoalan:

- Stigma
- Kurangnya penerimaan sosial
- “isolasi”
- Diskriminasi
- Marginalisasi

Hambatan utama:

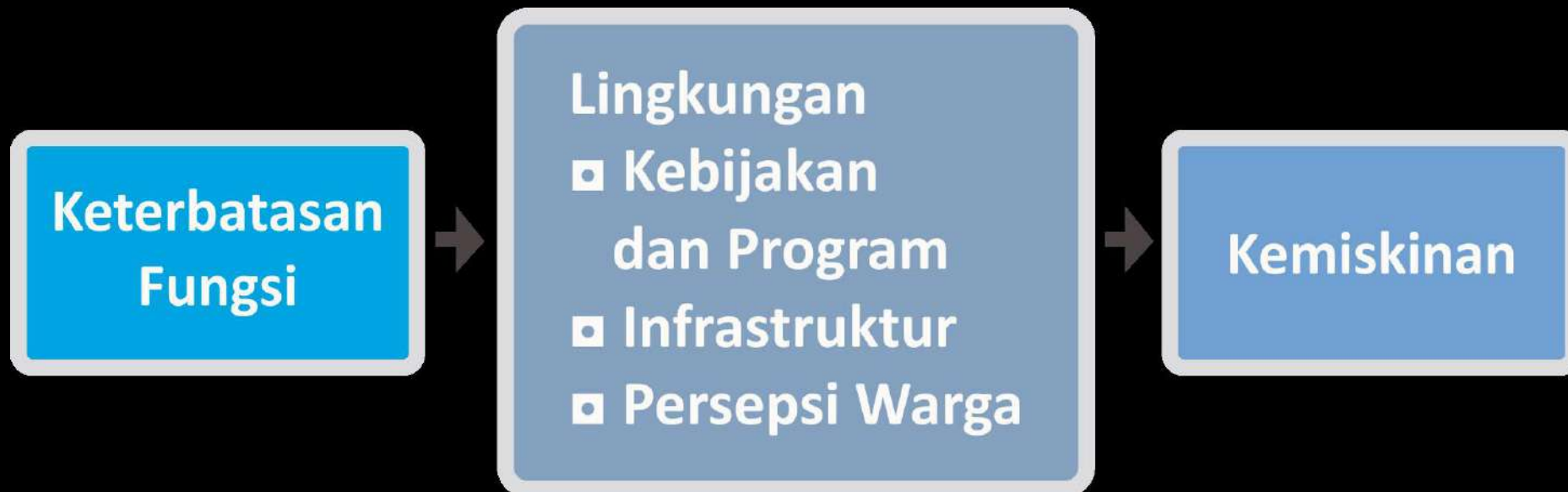
- Komunikasi
- Informasi
- Mobilitas



Hak-hak Penyandang Disabilitas belum dapat terpenuhi

Problema Umum Pembangunan kekinian

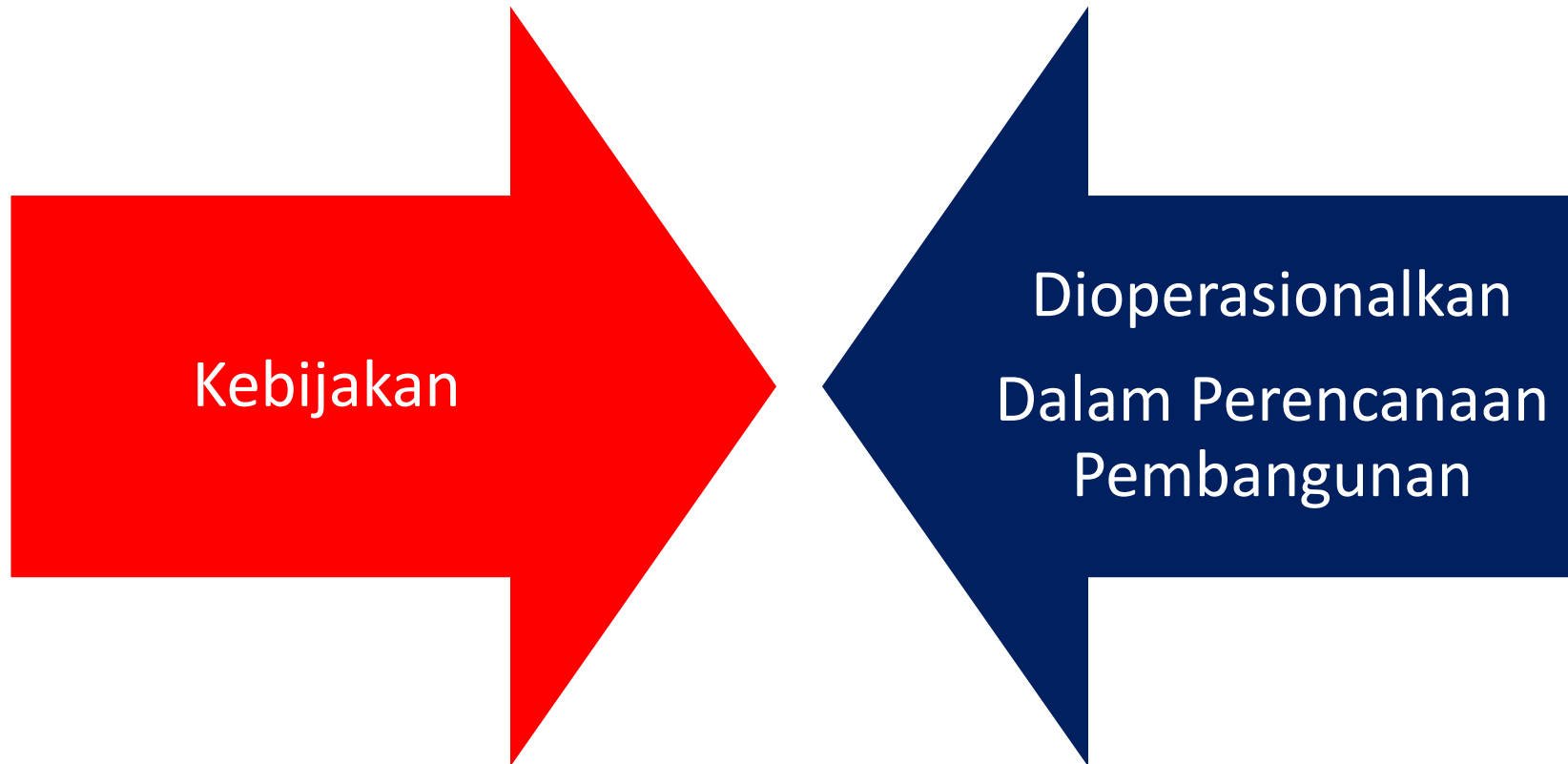
- Kemiskinan & Penyandang Disabilitas (*1 dari 5 orang miskin di dunia merupakan penyandang disabilitas dan sebagian besar tinggal di negara berkembang*). Ada hubungan yang kuat antara disabilitas dan kemiskinan.
- Layanan Publik belum semua akomodatif bagi difabel (Pendidikan, Infrastruktur, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dll)



Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas

- Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (disahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- PERDA Propinsi DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

SOLUSI ?????



Sustainable Development Goals/SDG's)

- *Sustainable Development Goals/SDG's)* merupakan agenda pembangunan dunia yang diterbitkan pada tahun 2015 untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Dokumen yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan dan 169 target yang terukur

Penyempurnaan MDG's

- komprehensif,
- memperluas sumber pendanaan,
- menekankan pada hak asasi manusia,
- inklusif, melibatkan masyarakat madani, targetnya lebih tinggi, dan
- tidak hanya membuat goals tetapi memuat tentang sarana pelaksanaan.

Prinsip

- **Prinsip pertama adalah *universality***. Prinsip ini mendorong penerapan TPB di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB harus diterapkan di **seluruh wilayah Indonesia**.
- **Prinsip kedua adalah *integration***. Prinsip ini mengandung makna bahwa TPB dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi **sosial, ekonomi dan lingkungan, Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**.
- **Prinsip terakhir adalah “*No One Left Behind*”** yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kepada Penyandang Disabilitas.

Mengarusutamakan Disabilitas, berarti:

- Penyandang Disabilitas sebagai subyek
- Menjadi perlu mendapatkan perhatian
- Pelibatan secara penuh
- Berbasis pada kebutuhan dan kondisi
- Aksesibilitas pada semua aspek
- Afirmasi



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

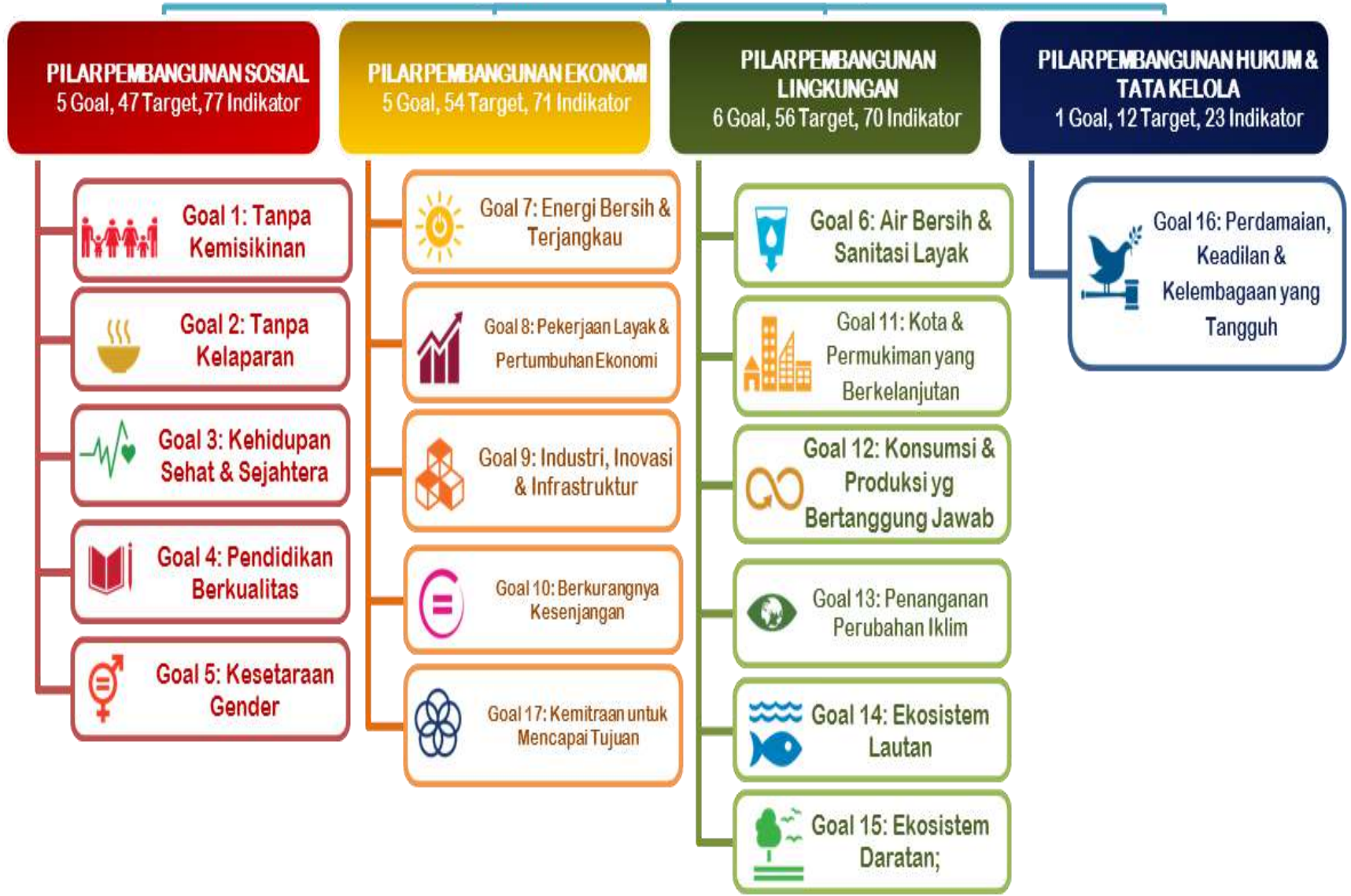


Semua TPB (SDG's) terkait dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas



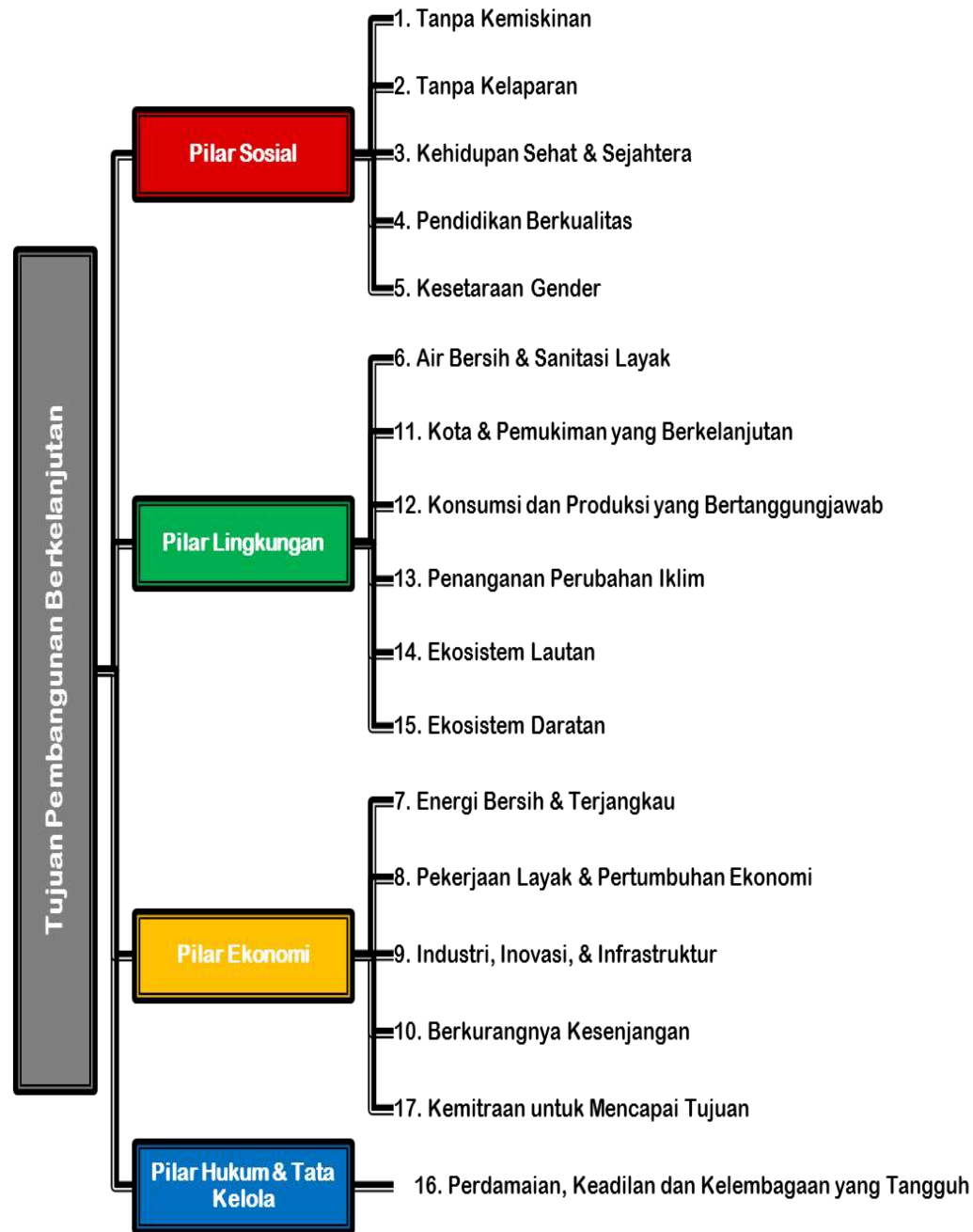
SDGs

17 Goal, 169 Target, 241 Indikator





Apa saja TPB (SDGs) yang Paling Berkaitan dengan Disabilitas di Kabupaten Gunungkidul?





TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

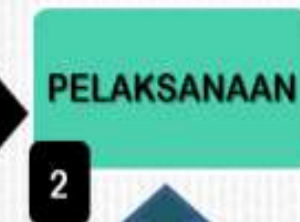


Beberapa TPB (SDG's) terkait langsung dengan Penyandang Disabilitas

Pemda dan TPB (SDGs) Berperspektif Disabilitas

- ❑ **Pemda merupakan pelaksana** dalam pencapaian SDGs.
- ❑ SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen Internasional **harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah**
- ❑ Tahapan dan proses pencapaian SDGs di daerah **merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri**

Pemda menyusun program dan kegiatan yang arahnya pada **pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan**



Melaksanakan rencana yang disusun dengan **melibatkan seluruh pihak terkait**

Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan **melihat kesesuaian dengan arah SDGs**



Evaluasi hasil capaian program dan kegiatan dari sisi **kontribusinya terhadap pencapaian SDGs**

Pembangunan inklusif butuh payung hukum & kebijakan

- Apakah perlu melakukan harmonisasi kebijakan untuk pembangunan inklusif ?
- Apa saja kebijakan pemda yang perlu diharmoniskan?
- Sejauhmana kebijakan pemda memastikan pembangunan inklusif terujud di daerah ini?
- Bagaimana tindaklanjut dari Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

PERDA PROP DIY
NO 4 TAHUN
2012 TENTANG
PERLINDUNGAN
DAN
PEMENUHAN
HAK
PENYANDANG
DISABILITAS



PERDA KAB.
GUNUNGGKIDUL
NO 9 TAHUN
2016
Tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Dan Pemenuhan
Hak Penyandang
Disabilitas

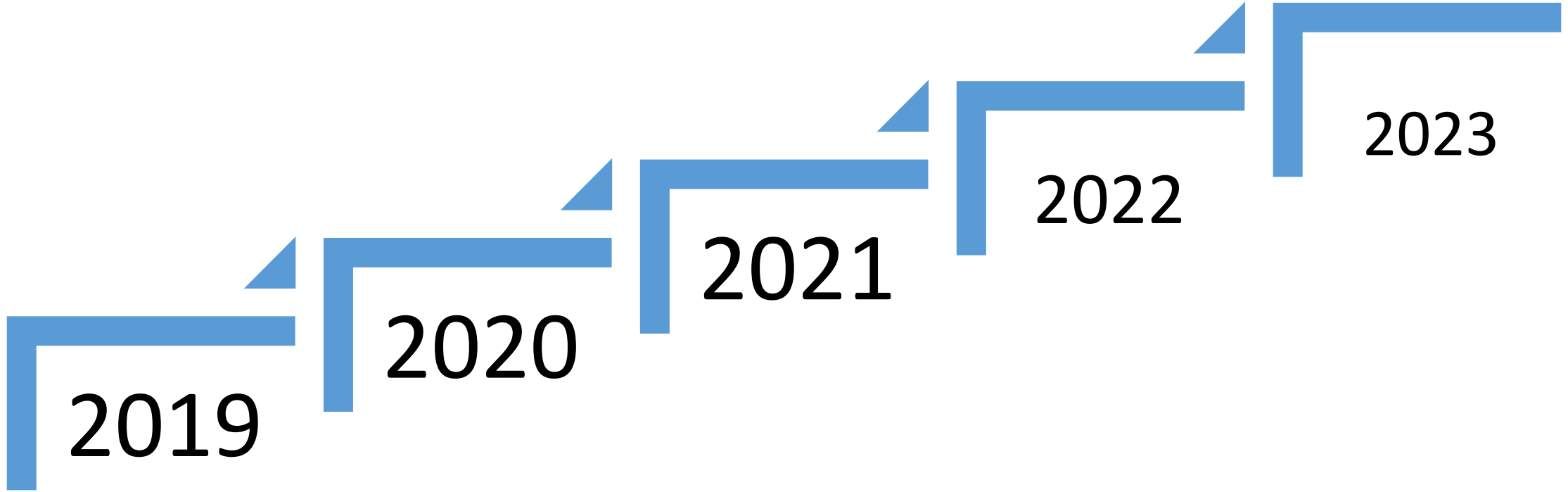
Pembangunan inklusif melalui Perencanaan#

- Seauhmana perencanaan pembangunan inklusif di daerah ini?
- Seberapa intens penyandang disabilitas terlibat dalam perencanaan pembangunan di daerah ini?
- Apakah TPB (SDGs) terintegrasi dalam RPJMD, Renstra, dll sudah berperspektif disabilitas?

- RPJPD = Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- RPJMD= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- KUA-PPAS = Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),
- RKA SKPD Rencana Kerja Anggaran SKPD
- APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Perlu juga menyusun target capaian per tahunnya



Tanya Jawab

- Hardiyo
- Baru ada 2 yang dipilih
- Jangan hanya menjadi penonton saja,
- Kunjungan wisata 150.000 ribu PD perlu juga dilibatkan
- Infrastruktur, taman batu akan dibuat jalan khusus untuk kursi roda, juga kios u disabilitas
- Kios harus bangun sendiri

Asbandi, Dikpora

- Jaman sekarang kolaborasi
- Target daya saing disabilitas, apa yang bias diberikan dukungan
- Sudah disediakan infrastruktur
- Pemahaman masyarakat atas ABK, banyak orangtua yang rela anaknya disebut ABK
- Bagaimana memberikan layanan yang baik.
- Guru pendamping khusus masih kesulitan

Untung

- NPC
- Pembangunan luar biasa tapi untuk penyandang disabilitas belum mengena. Yang kena baru di olah raga
- Ada yang dekat dengan disabilitas tapi anggaran sangat rendah.
- BLK, Kesbangpol, social,